

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai proses peningkatan kualitas dan kapabilitas, pembangunan dibutuhkan juga pada sektor ekonomi. Persoalan kemiskinan, kesejahteraan dan pengangguran mendorong terbentuknya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Percepatan pertumbuhan ekonomiselalu diidentikan dengan industrialisasi yang menjadi primadona bagi negara-negara berkembang. Tuntutan zaman untuk meningkatkan taraf hidup juga dirasakan di negara Indonesia. Munculnya variabel industrialisasi sebagai bentuk usaha yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan secara optimal sumber daya alam sekaligus sebagai penanda bangkitnya kemajuan teknologi. Bagi negara berkembang pembangunan industri pada dasarnya seperti perubahan dari negara tradisional mengarah pada negara modern atau sebagai peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Akibat dari perubahan berdampak pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial, budayanya.¹ Kehadiran industri juga mengakibatkan pada perubahan penampakan fisik daerah selain itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Industrialisasi di berbagai negara dipercaya sebagai obat untuk mengatasi permasalahan seperti, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi pengangguran, memperluas kegiatan ekonomi penduduk, bahkan dapat menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang sebagai superior dan minoritas.

¹Purnawan Basundoro, 'Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gresik', *Humaniora*, XIII.2 (2001), 133–40.

Indonesia sebagai negara yang berhasil mengubah struktur perekonomian agraris menjadi industri ini hampir 80% tersebar di pulau Jawa, dan menjadikan Jawa sebagai pusat industri di Indonesia.²Daerah-daerah yang berpotensi sebagai pengembangan perekonomian industri akan memikat hati bagi para investor untuk mengeksplor sekaligus mengeksploitasi daerah yang dijadikan untuk mengembangkan bisnisnya. Apalagi jika daerah tersebut berada di wilayah strategis, kemudahan akses lahan, perijinan, ketersediaan pelabuhan, ketersediaan kawasan industri dan berbagai *support* perkembangan industri lainnya.

Otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia menjadikan setiap wilayah ditingkat daerah Kabupaten/Kota dituntut dan berhak untuk mampu memanfaatkan potensi daerah secara maksimal. Pemerintah daerah berhak untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang disesuaikan dengan Undang-undang. Mengembangkan daerah tidak dapat dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri maka diperlukan bantuan swasta sebagai pengembang. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda mulai dari pertambangan, kelautan dan berbagai potensi lainnya menjadi daya tarik bagi pihak investor. Tidak terhindarkan begitu juga dengan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat menjanjikan membuka peluang investasi seluas-luasnya.

Meluasnya wilayah industri di Kabupaten Tuban menjadi magnet tersendiri bagi para investor untuk berlomba-lomba berinvestasi di Kabupaten Tuban. Banyaknya peminat investor masuk ke wilayah Kabupaten Tuban tentunya bukan tanpa alasan. Tuban yang terkenal dengan kota pelabuhan kini bertransformasi menjadi kota yang padat industri. Tanah yang subur dengan beragam potensi sumber daya alamnya menjadi fokus utama para pengusaha. Mulai menggeliatnya pabrik-pabrik yang berstandar nasional sampai internasional. Kabupaten Tuban dan beberapa Kabupaten/kota lainnya di Jawa

²Moch. Rum Alim, 'Partisipasi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Poelitik*, 4.1 (2008), 219–32.

Timur diantaranya Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Bangkalan dipilih sebagai pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*)³ Sehingga betapa pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan tugas serta fungsinya untuk memainkan perannya dengan sebaik mungkin. Pemerintah yang baik adalah mereka yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya bukan kepentingan golongan, atau meniesipkan kepentingannya kelompok lewat kepentingan umum.

Bertransformasinya Kabupaten Tuban sebagai kota industri dengan di tandai berdirinya sejumlah pabrik dan fasilitas industri kelas dunia, sebagai strategi untuk megundang investor masuk ke Tuban. Perluasan wilayah industri di Kabupaten Tuban semakin meningkat di bagian sepanjang laut utara sebagian besar berada di daerah Kecamatan Jenu, Kerek, Merakuran dan Tambakboyo. Wilayah yang diperuntukkan bagi industri berat hampir sepertiga luas wilayah Kabupaten Tuban. Kebijakan pro perluasan wilayah industri ini ditujukan demi mewujudkan Kabupaten Tuban sebagai kota besar, sehingga mengapa pemerintah Tuban lebih melirik kepada potensi pasar industri. Diliriknya potensi pasar industri juga sebagai sasaran pembangunan Kabupaten Tuban periode 2016 – 2020 dengan fokus akselerasi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB, maupun pengurangan pengangguran terbuka.⁴

Awal kemunculan industri besar di Tuban di mulai dari pembangunan pabrik Semen Gresik sebagai ekspansi pabrik Semen yang ada di kabupaten Gresik yang mulai beroperasi ditahun 1990-an. Terpilihnya wilayah Tuban sebagai ekspansi industri semen dipengaruhi beberapa faktor seperti ketersediaan bahan (batu kapur, kwarsa), letak yang strategis berada di jalur pantura menghubungkan 2 provinsi (Jawa Timur dan Jawa Tengah), kemudahan aksesibilitas dalam membangun pelabuhan yang dapat memudahkan ekspor –

³DPRD Provinsi Jawa Timur, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur 2019-2039*, 2019

⁴ Penjelasan dari video profil Kabupaten Tuban

impor. Strategi yang dilakukan pemerintah waktu itu untuk mempermudah jalannya pembangunan industri dengan melakukan cara mobilisasi dukungan politik. Mobilisasi dukungan politik diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk mendekati dan mempengaruhi kelompok masyarakat sebagai bentuk interaksi antara negara–rakyat agar tercapainya kebijakan pemerintah yang telah diputuskan, disini yang menjadi aktor utama adalah negara.⁵ Semen Gresik menjadi perusahaan pertama BUMN yang didirikan di Kabupaten Tuban. Setelah mengawali terbukanya investasi di sektor pertambangan kapur memicu munculnya berbagai perusahaan pertambangan lainnya seperti: Semen Holcim (yang sekarang bersama dengan Semen Gresik menjadi Semen Indonesia), Holcim dibangun di tahun 2008 dan mulai beroperasi enam tahun setelah konstruksi dan oleh Bupati Tuban Fathul Huda dengan nilai investasi sebesar 300 juta dolar Amerika atau sebesar 3 Triliun rupiah⁶. Terdapat pula PLTU (Pembangkit listrik Tenaga Uap), TPPI, Petrochina, Pertamina TTU. Kini banyak pabrik – pabrik besar yang berdiri di Kabupaten Tuban mengelolapertambangan, minyak dan gas. Bertambahnya jumlah industri bertambah pula nilai investasi yang masuk di Kabupaten Tuban sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Tuban.

Besaran pendapatan asli kabupaten Tuban tiap tahunnya selalu memperlihatkan kenaikan hal ini juga dipengaruhi oleh masuknya investasi lokal dan asing. Pemerintahan Bupati Fathul Huda ini terlihat begitu mendukung kegiatan perekonomian terlebih disektor perindustrian. Pentingnya mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk dapat menarik investor, dibandingkan dengan industri pariwisata, perhotelan industri berat lebih memegang porsi yang lebih besar dari lainnya meskipun industri pariwisata terlebih wisata alam cukup beragam. Jika dibandingkan dengan periode sebelum atau ditahun 2010 ke bawah investasi yang masuk belum menampakkan

⁵Hilmy Mochtar, *Politik Lokal Dan Industrialisasi* (malang: UB Press, 2014).

⁶Rizkyka Ajeng Savitri, 'Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban Menarik Investor Asing Tahun 2011-2014', 2015.

peningkatan yang signifikan, yang tidak diikuti dengan aspek ekonomi yang tidak meningkat secara besar-besaran. Kepemimpinan Bupati Fathul Huda selama 2 periode ini memperlihatkan perkembangan industri yang terus meningkat, baik tidak hanya industri berat seperti pertambangan, minyak dan mineral namun juga memberikan peluang terbukanya industri IKM oleh masyarakat Tuban.

Misi dan Visi kabupaten Tuban tidak jauh dari program pemimpin Tuban yang terpilih sebagai produk kampanye diantaranya adalah akselerasi ekonomi, terlebih juga kegiatan ekonomi lebih digencarkan dengan memfokuskan pembangunan ekonomi berdaya saing di sektor pertanian dan industri agar dapat mewujudkan masyarakat sejahtera dan mengangkat kondisi keuangan. Visi, misi yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan untuk lima tahun mendatang tidak terlepas dari RPJMD Provinsi dan nasional agar saling berkesinambungan. Pengembangan dan pemberdayaan industri besar, IKM sebagai program unggulan pemerintah yang diusung oleh Bupati, Wakil bupati yang didukung dengan latar belakang beliau sebagai pengusaha sukses.

Produk hukum yang pro-investor menjadi langkah utama pemerintah mempermudah calon investor masuk. Aturan yang dibuat tentunya tidak hanya menguntungkan bagi investor saja melainkan kepentingan pemerintah Kabupaten Tuban. Aturan yang dibuat untuk mengawasi investasi sehingga terbentuk pola yang terarah, beberapa hal yang terkait seperti: Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pendelegasian wewenang penandatanganan perijinan.⁷ Kemudahan perijinan usaha atau penanaman modal dirasakan berubah sejak tahun 2011 pada masa kepemimpinan Bupati Fathul Huda yang sebelumnya dirasa begitu sulit dan menjadi kendala investor yang masuk. Semenjak kepemimpinan Bupati Fathul Huda banyak peraturan yang diperbarui dan mendapat cukup perhatian sehingga berdampak pada pertumbuhan investasi. Keberhasilan pengimplementasian program tidak

⁷Ibid, hal 10.

akan berhasil jika dilakukan hanya seorang maka diperlukan elemen pendukung seperti institusi pemerintahan sebagai pendukung sekaligus penggerak keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemimpin.

Bupati Fathul Huda bukan hanya seorang pengusaha sukses tetapi beliau juga seorang tokoh agama (kyai) oleh masyarakat NU, banyak dukungan yang didapatkannya dari berbagai kalangan yang menjadikannya memiliki pondasi kuat untuk maju menjadi Bupati Tuban selama 2 periode. Selama 2 periode tersebut Bupati Fathul Huda diusung dari partai PKB sebagai basis terbesar dari masyarakat NU. Dalam 2 tahun terakhir pemilu legislatif tingkat Kabupaten di dominasi fraksi PKB. Mendominasinya kader PKB yang berada dalam lembaga legislatif berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dalam merancang regulasi tentang industrialisasi di Tuban, Sebagai pemimpin memiliki kekuasaan untuk mendikte semua kebijakan yang dibuat. Lalu bagaimana dengan kondisi industri selama 2 periode kepemimpinan Bupati Fathul Huda apakah mengalami perkembangan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemerintahan dimasa sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan industri di Kabupaten Tuban dalam 2 periode masa Bupati Fathul Huda?
2. Apa kepentingan pemerintah Kabupaten Tuban dalam pembangunan industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari munculnya beberapa rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1.1.1 Mengetahui bagaimana perkembangan industri di Kabupaten Tuban dalam 2 periode masa Bupati Fathul Huda
- 1.1.2 Mengatahui apa kepentingan pemerintah Kabupaten Tuban dalam pembangunan industri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis manfaat penelitian yang berfokus pada perkembangan industry yang ada di Kabupaten Tuban dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengembangan ilmu politik khususnya dalam kajian yang serupa atau berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Serta dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan industry dengan berbagai kepentingan yang ada dalam proses didalamnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diberikan secara praktis dari penelitian ini mampu memberikan gambaran secara mendalam serta dapat menjelaskan tentang bagaimana kondisi yang terjadi senyatanya tentang bagaimana pengelolaan industridi tingkat daerah. sehingga manfaat penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh penulis tetapi juga masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Tuban.

1.5 Konseptual

1.5.1 Pemerintahan Lokal

Pemerintahan merujuk pada suatu organisasi formal negara yang didalam pelaksanaannya dijalankan oleh beberapa orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan penggunaan istilah lokal merujuk pada wilayah geografis atau daerah yang memiliki batasan-batasan menurut undang-undang. Sehingga pengertian dari pemerintahan lokal adalah pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah di suatu wilayah tertentu untuk membuat suatu kebijakan dan keputusan yang baik untuk masyarakat negara. Kemunculan pemerintahan lokal hasil dari demokratisasi sehingga pentingnya untuk mempelajari pemerintahan lokal dalam mewujudkan kebaikan bersama, selian itu pemerintahan lokal tidak terlepas dari praktik politik yang menyangkut banyaknya aktor politik lokal dengan berbagai kepentingannya yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan disuatu daerah.

Analisis politik pemerintahan lokal tidak hanya menyangkut aktor politik dalam membuat suatu keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan tetapi juga berfokus pada cara-cara orang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengetahui jenis-jenis kelompok yang ikut dalam partisipasi proses politik, didalam kajian politik membahas dua persoalan penting yaitu partisipasi politik untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal.⁸ Tujuan adanya pemerintahan lokal untuk memberikan ruang bagi publik untuk ikut serta dalam proses politik di wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pemerintahan lokal tidak sekedar dipahami sebagai transfer kekuasaan dari pusat ke lokal. Di tataran politik pemerintahan lokal juga diperkenalkan sistem pemilihan daerah sebagai jaminan dari berjalannya demokrasi suatu negara melalui mekanisme pemungutan suara sehingga kekuasaan tidak berada di

⁸Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2014).

genggaman segelintir orang (oligarki). Meskipun senyatanya kekuasaan yang berada di level lokal banyak dipegang oleh segelintir orang dan hal ini sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Dan semestinya fenomena oligarki tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan tugas negara di ranah lokal untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi kekuasaan yang diberikan pemerintah pusat kepada badan-badan di tingkat daerah diberikan melalui mekanisme politik administrasi yang disebut desentralisasi yang diimplementasi dalam kebijakan otonomi daerah dan daerahnya dinamakan daerah otonom.⁹ Sejatinya otonomi daerah ini sebagai salah satu pencegahan pemusatan kekuasaan di satu pihak, sehingga masyarakat secara luas dapat ikut serta dalam partisipasi politik atau bahkan bisa menjadi salah satu bagian dari pemegang kekuasaan sehingga masyarakat bisa menggunakan hak-haknya sebagai masyarakat sipil dan dapat mengambil keputusan secara tepat untuk kebutuhan daerah. Keputusan yang diambil suatu daerah tentunya tidak mengesampingkan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada apa keinginan aktor politik lokal. Disamping itu otonomi daerah juga difungsikan untuk mencegah disintegrasi. Jika suatu daerah bisa dikatakan maju dan berjalan sesuai dengan tujuannya maka pada saat bersamaan akan ikut mempengaruhi perkembangan kemajuan negara, karena daripada kunci keberhasilan negara (pusat) juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memutuskan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat daerah, yang tentunya dalam menjalankan tugas tersebut tidak keluar dari undang-undang pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Elit politik dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan dan melibatkan aktor lain diluar aktor elit pemerintah lokal seperti masyarakat atau elit non-pemerintah (swasta) yang nantinya dapat membantu dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan terutama dibidang pembangunan daerah yang

⁹ibid. hal. 29

tentunya akan membutuhkan banyak mitra. Di dalam pemerintahan daerah juga terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dimana ketiga lembaga tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan sesuai diranah lokal. Sementara itu lembaga legislatif (DPRD) bersama dengan lembaga eksekutif (Bupati/Wali kota) harus berjalan secara bersamaan dan sinergi untuk menciptakan masyarakat sadar dan kuat politik dan sosial, budaya serta ekonominya.

Kebebasan daerah dalam kemandiriannya untuk membangun daerah menjadi lebih maju dan baik lagi tidak terlepas dari bagaimana antara pemerintah, masyarakat dan elemen lainnya bekerjasama, sehingga tidak jarang jika suatu daerah dinyatakan maju dan berkembang berdasarkan pembangunan daerah. menggunakan trilogy pembangunan daerah yang menempatkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan dan stabilitas nasional merupakan target utama daerah dalam mencapai tujuannya. Asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi akan membantu pemerataan di seluruh kalangan.

1.5.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani *outonomos/autonomia* yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*). *Autonomos* yang terdiri dari kata *auto* ‘sendiri’ dan *nomos* ‘aturan atau undang-undang’ sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan atau aturan yang dibuat untuk dapat mengatur dirinya sendiri, dan daerah yang merujuk pada wilayah yang memiliki batasan-batasan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara mandiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah memiliki kebebasan dalam mengambil setiap keputusan yang akan diterapkan pada masing-masing daerah dengan tidak meninggalkan aturan-aturan negara dan kepentingan nasional.

Dalam otonomi daerah juga terdapat lembaga eksekutif, legislatif (perwakilan politik) dan lembaga peradilan serta hak-hak dan partisipasi politik warga negara lokal harus dijamin dan dilindungi secara menyeluruh karenanya sebagai bentuk dari system otonomi daerah politik lokal.¹⁰Perubahan orientasi pembangunan yang semula dari *top down* kini berubah menjadi *bottom up* menunjukkan daerah memiliki andil besar dalam pembangunan. Dalam praktik pelaksanaannya secara politis pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dapat mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri, dan secara ekonomis pemerintah daerah akan diuntungkan dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah berperan besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.¹¹ (jurnal otoda, hal 6). Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya masih terdapat tarik ulur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pasalnya melimpahan wewenang kepada pemerintah daerah belum menunjukkan kepercayaan sepenuhnya kepada daerah, hal ini dipengaruhi karena belum menunjangnya kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah juga masih terdapat tumpang tindihnya wewenang yang mengatur persoalan pelaksanaan kebijakan.

1.5.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi sering diartikan sebagai cara-cara untuk menaikkan pertumbuhan GNP (Gross National Product) namun seiring dengan berjalannya waktu jika pembangunan hanya berorientasi pada laju pertumbuhan GNP maka tidak akan mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar.¹²Jika pembangunan hanya sekedar pada bertambahnya pendapatan saja maka pembangunan tersebut tidak berpengaruh pada perubahan kualitas hidup sebagian masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2003) dalam Lincolin Arsyad

¹⁰ Ibid. hal36

¹¹Sakinah Nadir, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2013), 2013
<<https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>>.

¹²Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).

(2010) keberhasilan pembangunan ekonomi terdapat tiga pokok penting yaitu (1) perlunya mengembangkan kemampuan masyarakat, (2) meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia, (3) kemampuan masyarakat untuk bebas dan mendapatkan HAM sebagai manusia.¹³

Negara bertindak agar tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan perbaikan taraf kehidupan melalui pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan disertai dengan perbaikan kelembagaan. Oleh karena itu pembangunan harus dipandang sebagai keterkaitan antar berbagai aspek dan saling mempengaruhi dengan begitu tujuan dari pembangunan seutuhnya dapat tercapai. Pembangunan ekonomi ditingkat daerah mengharuskan pemerintah daerah beserta masyarakat bekerjasama agar dapat mengelola potensi daerah dan membentuk mitra kerja bersama sektor swasta untuk merangsang perkembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah mencakup pembangunan industri-industri, ketenagakerjaan, pembentukan institusi baru, dll.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah diperlukan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung jalannya perubahan. Namun yang menjadi permasalahan dalam proses pembangunan adalah persiapan. Persiapan memberikan penekanan pada kebijakan pembangunan daerah, pengambilan langkah-langkah inisiatif oleh pemerintah. Sehingga hasil dari pembangunan ekonomi daerah berjalan sesuai tujuan. Proses perencanaan pembangunan harus dibuat secara seimbang antara kepentingan publik dan swasta (pengusaha kecil, besar, koperasi) dan organisasi sosial.

1.5.4 Industrialisasi

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang lebih modern, kegiatan yang dihasilkan industri adalah mengelola dari bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang memiliki nilai tinggi. Kegiatan perencanaan pembangunan dan proses industri itu disebut dengan perindustrian.

¹³Loc.cit.

Industri dengan kata lain sebagai kegiatan ekonomi yang telah dimodernisasi dalam pengolahannya. Proses industri atau industrialisasi yang banyak diterapkan di berbagai negara dunia ini merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang jalur kegiatannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan lebih bermutu. Industri tidak hanya bertujuan sebagai peningkatan mutu hidup saja melainkan mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sehingga dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik point utama tentang industrialisasi yaitu meskipun industri itu bentuk perwujudan dari kegiatan ekonomi namun memiliki keterkaitan dengan aspek kehidupan lainnya dengan tujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri sebagai leading sector sebagai perangsang pembangunan pada sektor lainnya.¹⁴

Modernisasi ekonomi (industrialisasi) juga menjadikan berkembangnya beberapa kelembagaan negara seperti lembaga – lembaga keuangan, lembaga pemasaran atau lembaga periklanan dan beberapa lembaga lainnya yang dapat mendukung laju pertumbuhan industri. Kenapa industri dijadikan sebagai faktor utama dan keharusan yang harus dimiliki negara. Karena industri banyak memberikan janji-janji yang telah banyak dibuktikan oleh negara-negara maju sehingga industri ditetapkan sebagai pembangunan ekonomi yang dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang yang berkelanjutan. Disamping itu juga dapat menghasilkan pendapatan perkapita di setiap tahunnya yang dapat mengalami kenaikan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Ekonomi Politik

Hubungan ilmu ekonomi dan ilmu politik secara analitis mereka dua kajian ilmu yang berbeda, namun jika keduanya disatukan dalam satu konseptual

¹⁴ Ibid, hal 74

maka keduanya tidak dapat dipandang sebagai dua jenis yang berbeda. Dua hal yang tidak bisa terlepas karena keduanya saling berkaitan. Dimana ekonomi diartikan sebagai pemuas kebutuhan manusia, ekonomi juga berkenaan dengan pilihan dan pengaturan pasar. Ekonomi bisa saja dilihat sebagai kalkulasi yaitu memperhitungkan tindakan individu atau kelompok untuk memperoleh kebutuhan pribadi berdasarkan perilaku pasar. Sedangkan dalam bidang politik membahas persoalan kekuasaan siapa yang mendapat apa, bagaimana dan kapan. Politik dalam artian negara dimaknai sebagai institusi yang memiliki legalitas untuk dapat mengatur persoalan yang menyangkut kepentingan publik, bahkan persoalan pasar sekalipun agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Ekonomi politik itu adalah hubungan antara wilayah publik dan wilayah privat atau antara sub-sistem ekonomi dengan sub-sistem politik, dengan kata lain menurut pendekatan ekonomi terhadap politik, ekonomi politik bukan lagi “apa yang akan terjadi” ketika wilayah ekonomi bertemu dengan wilayah politik namun ekonomi politik menitikberatkan pada penalaran ekonomi terhadap proses-proses politik.¹⁵ Persamaan dari keduanya sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang, alokasi sumber daya langka. Jika politik alokasi nilai kekuasaan sedangkan ekonomi alokasi nilai produksi. Subtansi politik yang digambarkan sebagai tindakan para pemain politik dan transfer kekuasaan, disisi lain ekonomi sebagai telaah sejauh mana para ekonom secara individu maupun kelompok mematuhi aturan-aturannya. Kegiatan perekonomian tentunya juga tidak terlepas dengan pembuatan kebijakan yang mengatur seluruh aktivitas perekonomian. Analisis pembuatan kebijakan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur segala tindakan yang berorientasi dibidang ekonomi agar terciptanya keselarasan.

Ekonomi politik dipahami secara substantif dan metodologis yaitu penerapan metode politik terhadap ekonomi dengan dianalisis melalui distribusi

¹⁵David Caporaso, James dan Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992).

kekuasaan dalam situasi pasar.¹⁶Politik dalam ekonomi politik dilihat sebagai metodologis dimaknai sebagai penggunaan dan distribusi kekuasaan untuk mempengaruhi aktivitas pasar, karena bagaimanapun tindakan politik mengandung ekonomi yang mengutamakan keuntungan.perlunya intervensi negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu wilayahagar terciptanya persaingan pasar yang sempurna. Secara teoritis dalam ekonomi politik terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berbasis pada pasar (*market oriented*) dan pendekatan yang berbasis pada negara (*state oriented*). Ekonomi politik yang berbasis pada negara menyatakan bahwa negara memiliki agenda tersendiri untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁷Dalam pendekatan negara ini peranan politik lebih besar dibandingkan dengan ekonomi.Politik yang diartikan ke dalam bentuk pemerintahan memiliki ruang gerak leluasa untuk menentukan kebijakan perekonomian.

Melalui pendekatan ini negara diartikan sebagai individu-individu yang memiliki kekuasaan dan memegang jabatan sentral dalam negara (pemerintahan) mereka berhak untuk menentukan kebijakan apa yang diputuskannya, berlaku untuk seluruh individu non-pejabat dan pejabat. Sebagaimana pandangan ekonomi politik menurut Keynes, pentingnya peranan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian penguasa politik itu dapat mempengaruhi ekonomi melalui regulasi pemerintah.¹⁸Bagaimana pemerintah berhasil mempengaruhi dalam mengelola perekonomian yang memerlukan agenda politik yang tidak cukup jika didasarkan pada fungsi administratif. Karena dalam pandangan Keynesian pasar sejatinya tidak dapat meregulasi dengan sendirinya, membutuhkan peran pemerintah untuk dapat menjalankan roda perekonomian agar tidak terjadinya kegagalan pasar. Meskipun Keynes menganalisis ekonomi politik bertumpu pada peranegara namun dalam pembahasan teori kali ini tidak akan membahas ekonomi politik

¹⁶ Ibid, hal 303

¹⁷ Ibid, hal 66

¹⁸Yunus Handoko, 'Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx Dan Keynes', *Jibeka*, 7.2 (2013), 7.

berdasarkan pendekatan Keynes tetapi lebih mengkorelasikan dengan pendekatan negara berdasarkan otonomi negara.

1.6.2 Pendekatan Berbasis Negara Dalam Ekonomi Politik

Jika dalam ekonomi politik menganalisis berdasarkan pendekatan pasar seperti liberal klasik atau neoliberal yang melihat bahwa peran negara hanya sebatas instrumen atau institusi yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki akses untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya. Negara tidak dipandang sebagai pelaku aktif dalam memainkan perannya hanya dipandang sebagai instrumen yang memiliki fungsi bagi kelompok kepentingan atau kelas-kelas tertentu.¹⁹ Sedangkan pendekatan negara justru melihat negara sebagai institusi atau lembaga formal yang memiliki legalitas secara hukum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat menekankan pada keterlibatan negara untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Jadi peran negara tidak saja hadir ketika pasar telah mengalami kegagalan.

Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari sumber lainnya yang dapat menopang kehidupan negara. Dalam artian luas negara menyangkut kepentingan publik yang dijadikan kepentingan privat, tidak adanya sumber energi penopang lainnya kecuali dari perekonomian sehingga negara menjadi variable dependen (ketergantungan). Posisi negara dan ekonomi dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yang pertama pembedaan antara negara dengan perekonomian, kedua perekonomian diberikan posisi utama dan pusat dari perekonomian adalah kebutuhan dan kepentingan individu, terakhir negara dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi ketika kemampuan dari individu-individu secara pribadi (perekonomian) tidak dapat memenuhinya.²⁰

¹⁹David Caporaso, James dan Levine Op.cit. hal 445

²⁰Ibid, hal 446

Pendekatan ekonomi politik yang menitikberatkan pada negara (*state*) sebagai pemeran utama dalam kegiatan perekonomian yang mana telah memiliki keputusan sendiri dalam mereduksi akan kebutuhan publik dan pribadi. Untuk membedakan dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam kajian ekonomi politik para ilmuwan memberikan istilah “otonomi negara” sebagai penjabar bahwa negara itu sebagai pusat proses ekonomi. Otonomi negara yang merujuk pada kemampuan negara untuk mendefinisikannya sendiri dan menjalankan agenda secara independen tanpa adanya kepentingan pribadi dari individu-individu masyarakat.²¹ Analisisnya ekonomi dan politik awalnya memiliki wilayah yang berbeda antara privat dan publik, namun ketika diterapkan dalam pendekatan negara artinya wilayah politik adalah negara (publik) sekaligus memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian merupakan agenda dari publik yang kemudian ditarik menjadi agenda pribadi negara. kini ketika kepentingan publik dikelola oleh negara tanpa intervensi dari pihak manapun, tanpa adanya kepentingan eksternal maka kepentingan publik (masyarakat) menjadi kepentingan pribadi negara.

Kemandirian negara untuk mengatur dirinya sendiri memperlihatkan kendali sosial tidak sepenuhnya dapat mendikte keputusan negara, karena tidak seluruhnya tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh sosial (masyarakat) tidak menjadi agenda atau prioritas keputusan bersama. Seringkali pandangan antara negara dengan masyarakat berbeda atau bertentangan namun hal ini seringkali menjadikan keputusan yang telah diambil oleh negara mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Ketika suatu negara telah memutuskan untuk memilih otonomi negara maka seharusnya harus terlepas dari kepentingan-kepentingan kelas/kelompok meskipun senyatanya begitu sulit. Terdapat tiga konsekuensi yang harus ditanggung oleh pendekatan ini. (1) negara yang bebas adalah negara yang menang dan mampu melawan tekanan dari masyarakat karena perbedaan kepentingan, (2) negara tidak dapat dipengaruhi oleh kelompok kepentingan

²¹ Ibid, hal 447

manapun, (3) negara mampu menolak tekanan eksternal.²² Konsep ini banyak dianut oleh pemikir para pengambil kebijakan digambarkan negara kuat vs negara lemah.

Keputusan yang diambil menghasilkan suatu tindakan, yang mana tindakan tersebut dijalankan oleh individu-individu pemegang jabatan. Keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh elemen masyarakat negara. Pemegang jabatan dalam pemerintahan terkadang mengambil keputusan berdasarkan suara dari konstituenya. Maka menurut Eric Nordlinger dalam *On the Authonomy of the Democratic State* (1981) mengemukakan otonomi negara yaitu kemampuan pejabat negara untuk melaksanakan pilihan mereka dengan cara menterjemahkan pilihan tersebut ke dalam kebijakan publik yang selaras atau bertentangan dengan pilihan orang lain. Kebijakan yang diambil tidak selalu bersifat menguntungkan bagi masyarakat luas, keputusan-keputusan yang diambil dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Adanya pertentangan-pertentangan diantara pejabat dengan masyarakat menjadi pemicu konflik tuntutan-tuntutan yang terorganisir melalui kelompok-kelompok kepentingan (partai politik) yang disodorkan ke negara. Pendekatan yang berfokus pada peran negara seharusnya lebih mempertimbang kepentingan publik yang menyangkut banyak elemen bukan beranggapan tujuan negara itu sekumpulan dari kepentingan hanya untuk segelintir orang saja. Pada dasarnya tujuan negara sendiri merujuk pada kepentingan dan keuntungan masyarakat luas atau lebih tepatnya mengedepankan kepentingan nasional.

Sebagai institusi formal negara bertanggung jawab untuk menentukan nilai-nilai yang dianut dan berguna untuk menentukan tujuan hidup publik. Seperti apa yang telah dinyatakan sebelumnya, sebagai negara otonom secara independen memiliki pandangan dan agenda yang akan dicapainya. Agenda negara sama dengan kepentingan nasional, tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa/negara berdasarkan kebutuhan dan cita-cita. Para pembuat keputusan kebijakan berusaha memilah dan memilih bagian-bagian terpenting yang akan

²² Ibid, hal 450

masuk pada agenda kepentingan nasional. Pembuat kebijakan melihat perspektif kepentingan nasional didasarkan pada kebutuhan dan kekuatan publik, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadi baik dari kelompok kepentingan maupun pemangku kekuasaan itu sendiri.

Dalam pemahaman pendekatan berbasis negara yang bertumpu pada institusi politik sebagai pemegang kewenangan dapat menjelaskan hubungan seperti apa politik (negara) dengan ekonomi. Negara dapat meregulasi hal-hal yang menyangkut perekonomian beserta pelaku ekonomi. Negara sebagai penghasil kebijakan sumber daya yang mempengaruhi distribusi pasar atau kebijakan makro-ekonomi mempengaruhi pasar. Meskipun dalam pelaksanaannya pengaruh penguasa politik tidaklah dijalankan secara langsung melainkan melalui variable-variabel lain seperti pengaturan melalui regulasi pemerintahan.

1.7 Metode dan prosedur Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada persoalan perkembangan industri di Kabupaten Tuban selama 10 tahun terakhir serta kepentingan apa yang dibawa oleh pemerintah. Industrialisasi dipilih sebagai jawaban perkembangan zaman dan Kabupaten Tuban diarahkan sebagai kawasan industri besar di Jawa Timur. Melihat fenomena perkembangan industri selama kepemimpinan Bupati Tuban yang juga berlatar belakang sebagai seorang pengusaha kaya. Sehingga sebenarnya dalam prosesnya apakah terdapat kepentingan pribadi yang dibawanya atau kepentingan golongan. Dan mengetahui apakah terdapat relasi yang terjalin antar elit dengan pengusaha diluar hubungan kerjasama antara pemerintah dengan investor.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, yang menurut Lisa Horriion penelitian yang menggunakan metode kualitatif itu metode yang dapat

menganalisis perilaku manusia yang tidak bisa dirubah ke dalam bentuk metode kuantitatif. Peneliti secara langsung ikut dilibatkan dalam setting sosial yang telah menjadi sasaran peneliti. Sehingga peneliti dapat turun langsung ke lapangan/lokasi penelitian dan bisa mengamati secara langsung.²³Karena jenis penelitian ini kualitatif deskriptif maka yang diharapkan bisa menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana kondisi perkembangan industry di Tuban saat ini yang akhirnya menciptakan Kabupaten Tuban sebagai daerah pengembangan industri besar di Jawa Timur. Selain itu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan maupun data literature bisa dikelola dan dijadikan bahan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Perkembangan Industri dalam Perspektif Ekonomi Politik pada Pemerintahan Bupati Fathul Huda periode 2011-2020 di Kabupaten Tuban, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah kabupaten Tuban. Alasan yang mendasari terpilihnya Tuban sebagai tempat penelitian. Pertama, Kabupaten Tuban yang dipilih sebagai salah satu kawasan pengembangan industri besar yang ada di Jawa Timur. Kedua hampir beberapa perusahaan besar nasional dan internasional tumbuh di Kab. Tuban dan penampakan Kab. Tuban sekarang ini cukup berbeda jika dibandingkan sebelumnya. Lalu adakah keterkaitan antara pengaruh sosok Bupati Fathul Huda dengan perkembangan industry selama 2 periode kepemimpinannya.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang sah/*real* sebagai bahan penelitiannya.

²³Lisa Horrison, *Metodologi Penelitian Politik*, ed. by Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Group, 2007).

Tabel 1 Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Sasaran Data
1.	Ketua DPRD Kabupaten Tuban	Selaku ketua DPRD Tuban sebagai pimpinan lembaga legislatif yang berwenang untuk membuat kebijakan. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan perkembangan industri serta melihat langkah apa yang diambil untuk mengatur industry dan IKM di Tuban.
2.	Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Kabupaten Tuban	Sebagai anggota DPRD komisi B bidang perekonomian yang lebih mengetahui kondisi perkembangan perekonomian Tuban, dan berwenang membuat perda yang berkaitan dengan industri serta melihat respon mereka dalam menanggapi perkembangan industry di Tuban.
3.	BAPPEDA	Sebagai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bekerja secara teknis. Menyusun pola perencanaan daerah, termasuk RPJMD, pengembangan wilayah daerah industry yang didasarkan pada peraturan RTRW
4.	Dinas Koperasi, Industrialisasi dan Perdagangan	Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan jumlah usaha (koperasi, industri dan perdagangan) di Kab. Tuban di setiap tahunnya.
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Sebagai dinas yang menangani proses investasi sampai pada penyelenggaraan,

	Satu Pintu	pelayanan perijinan, pengawasan investasi. Untuk mengetahui perkembangan investasi Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun.
6.	Kepala Desa	Selaku kepala pemerintahan ditingkat desa dan yang lebih dekat aksesnya dengan penduduk secara langsung, untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat terkait dengan semakin banyaknya jumlah industri yang kian bertambah sekaligus permasalahan dibangunnya perusahaan kilang minyak.
7.	Warga	Sebagai individu-individu yang langsung merasakan dampak dari pembangunan industri besar di Kab. Tuban terhadap kehidupannya sekaligus melihat respon yang dilakukan ketika terjadi pemberitaan akan dibangunnya kilang minyak di Kec. Jenu.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview) dengan narasumber. Wawancara mendalam adalah hal yang paling penting untuk memperoleh data dari narasumber dengan cara mempertanyakan pendapatnya, pengalaman pribadi seseorang atau bahkan sikap yang berpedoman dengan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Perlu juga untuk dilakukan observasi sebagai bentuk pengamatan dari peneliti terhadap objek lain yang sedang diteliti.²⁴

²⁴ Ibid hal 93-94

Saat melakukan wawancara dengan narasumber tidak lupa untuk merekam pembicaraan yang sedang berlangsung. Alat yang digunakan untuk merekam yaitu alat perekam *handphone* difungsikan untuk merekam dan menyimpan bukti suara yang diperoleh dari narasumber, yang digunakan disetiap wawancara. Rekaman suara dipilih oleh peneliti agar mempermudah peneliti dalam mengelola informasi dan untuk menghindari hilangnya data atau jika ada ketidakjelasan perkataan saat berlangsungnya wawancara. Data sekunder (data yang diperoleh dari website, jurnal maupun bahan bacaan atau sumber lainnya) sebagai pendukung data penelitian. Tidak lupa mendokumentasikan momen-momen yang berlangsung saat wawancara sebagai data pelengkap dari kegiatan wawancara.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Kegiatan teknik analisis data adalah hal yang paling penting, pasalnya kegiatan terakhir ini memerlukan ketajaman menganalisis perkataan, data yang diperoleh dari hasil lapangan. Analisis substantive merupakan kegiatan dimana seorang peneliti harus dapat mengidentifikasi secara cermat dari setiap kata atau frasa dengan tujuan akhir dapat mengetahui makna dibalik dari data yang diperoleh.²⁵

Kegiatan pertama yang harus dilakukan setelah melakukan wawancara yaitu dengan membuat transkrip wawancara, dengan membuat transkrip dapat diketahui kunci jawaban dari mana-mana saja yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti sehingga tidak semua data yang diperoleh diolah secara keseluruhan, maka dari itu perlunya memilah dan memilih data yang sesuai dengan topik. Kemudian setelah itu kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis antara jawaban/data yang diperoleh dengan teori yang relevan, melihat apakah adanya kesesuaian antara teori dengan data yang diperoleh

²⁵ Ibid hal 133